BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini telah menjadi sorotan publik, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Masyarakat mulai mempertanyakan atas nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin membengkak, nampaknya masyarakat masih belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh pemerintah.

Disamping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi dalam menjalankan tugas tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu instansi. Suatu keberhasilan instansi dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas dari peran pengawas dalam menghasilkan pendapatan suatu organisasi.

Adanya tuntutan ini, memaksa pemerintah pusat mengeluarkan suatu undang-undang yang dapat memberikan kebebasan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya masing-masing serta didalam pengaturan terhadap keuangan daerahnya. Maka disahkanlah undang-undang no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah serta undang-

undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan akan menciptakan suatu kemandirian daerah yang dapat memicu suatu pertumbuhan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan pada masyarakat daerah tersebut. Untuk itu diperlukan aparatur pemerintah yang cakap dan terampil untuk melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan sebagai perencana dan pelaksana pembangunan.

Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan, sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan semakin berat. Pelimpahan keuangan diharapkan dapat diimbangi dengan pengawasan yang dapat memberikan jaminan agar tidak terjadi kecurangan, penyelewengan, dan kebocoran yang tidak sesuai dengan rencana penggunannya

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang meliputi : hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan kondisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai sebab akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapakan pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung maupun tidak langsung dan sifat pemungutannya dapat dipaksakan. Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian.

Dengan tidak adanya suatu Inspektorat, maka akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kebocoran dan pemborosan kekayaan daerah khususnya Pemerintah Kota Bandung. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan pendapatan retribusi daerah Pemerintah Kota Bandung tidak akan tercapai. Fungsi penting Inspektorat dalam membantu manajemen pemerintahan untuk memeriksa dan mengawasi sistem pengendalian internal.

Dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah dapat terkontrol sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Karena fungsi inspektorat dalam melaksanakan audit sangat penting untuk peningkatan pendapatan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fungsi inspektorat dalam melaksankan audit yang berhubungan dengan tingkat pendapatan pada retribusi pemerintahan kota bandung.

Untuk meningkatkan pemerintah yang berhasil serta meningkatkan pelayanan terhadap warganya dalam usaha mempercepat tercapainya

kesejahteraan warga, kota Bandung sejak diterapkan sebagai daerah otonom pada tahun 1996, telah mengalami beberapa perubahan atau perkembangan seperti perkembangan pemerintahan, perkembangan kemajuan wilayah administrasi, dan perkembangan luas wilayah administrasi.

Adapun penelitian dilakukan pada inspektorat kota bandung karena inspektorat merupakan instansi pemerintahan yang melaksanakan audit dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan kekayaan daerah. Dengan maksud untuk mengetahui bagaimana peranan inspektorat provinsi dalam menunjang peningkatan pendapatan retribusi daerah pada pemerintah kota bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dengan judul :

”Tinjauan Fungsi Inspektorat Dalam Melaksanakan Audit Untuk Menunjang Peningkatan Retribusi Daerah Kota Bandung”

1.2 Maksud Dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud yang ingin dicapai dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Fungsi inspektorat dalam melaksankan audit. Sedangka tujuan dari Kerja Praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui inspektorat sudah melaksanakan fungsinya atau belum.

2. Mengetahui bagaimana tatacara inspektorat dalam melaksanakan audit.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan dari hasil kerja praktek ini diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

   Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap akuntansi khususnya fungsi inspektorat dalam melaksanakan audit untuk peningkatan retribusi daerah di pemerintahan kota bandung.

2. Bagi Perusahaan

   Sebagai bahan masukan tentang fungsi inspektorat dalam melaksanakan audit untuk peningkatan retribusi daerah pemerintah kota bandung.

B. Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti Lain

   Memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai masukan tambahan bagi yang membutuhkan dan sebagai saran untuk penelitian yang berhubungan dengan penulisan ini.

1.4 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi Kerja Praktek pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat di Jalan Surapati No.4 Telp.4237174-4231567 Fax.4231567 Email inspektorat@jabarprov.go.id Bandung. Adapun waktu pelaksanaan Kerja Praktek mulai 4 Juli sampai 10 Desember 2011.

Tabel 1.1

Jadwal Dalam Penulisan Laporan KKP

NO	Kegiatan	2011																			
		Jun			Jul				Agust				Sept		Okt		Nov			Des	
		22	23	24	4	5	6	7	5	8	9	10	5	6	10	11	20	21	22	8	28
1	Mengajukan Permohonan KKP																				
2	Mencari Tempat KKP																				
3	Pelaksanaan KKP																				
4	Mengajukan Judul																				
5	Mencari Data Lap.KKP																				
6	Pengolahan Data																				
7	Membuat Lap. KKP																				
8	Bimbingan Lap. KKP																				
	a. Judul																				
	b. BAB II																				
	c. BAB III																				
	d. BAB IV																				